



TOLAK PENUNDAAN PEMILU. Dari kiri Wakil Ketua Umum Progres Freddy Damari, Selim Projo Hardjoko, dan pengamat politik Adi Prayitno menyimpulkan Konferensi Pers Catatan Akhbar Tahun 2022: Mengantisipasi Dinamika 2023-2024 di Jakarta, kemarin. DPP Progres menentang penundaan pemilu dan penghapusan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode.

PPP Sangkal Sandiaga Uno Menjadi Anggotanya

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menyangkal isu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Sandiaga Uno sebagai anggota partai. Sandi menegaskan bahwa ia bukan anggota PPP. "Mungkin bisa ditanyakan bahwa sebenarnya siapa yang menjadi anggota PPP?," ujarnya. Sandi juga menegaskan bahwa ia bukan anggota PPP. "Mungkin bisa ditanyakan bahwa sebenarnya siapa yang menjadi anggota PPP?," ujarnya.

Sebelumnya, Sandi mengatakan bahwa ia bukan anggota PPP. "Mungkin bisa ditanyakan bahwa sebenarnya siapa yang menjadi anggota PPP?," ujarnya. Sandi juga menegaskan bahwa ia bukan anggota PPP. "Mungkin bisa ditanyakan bahwa sebenarnya siapa yang menjadi anggota PPP?," ujarnya.

KPU Bantah Rekaman Gagalkan Partai U

Sikap Komisi II DPR tetap sama, meminta agar seluruh proses yang dinyatakan kecurangan bisa dibuka KPU.

Yusuf Pratomo Wiyono
yusuf.p@medialindo.com

KOMISI II DPR tetap sama sikapnya, meminta agar seluruh proses yang dinyatakan kecurangan bisa dibuka KPU. Anggota Komisi II DPR Riffyatul Karuniyah saat dihubungi mengatakan sikap Komisi II DPR tetap sama meminta agar seluruh proses yang dinyatakan kecurangan bisa dibuka KPU.

Sikap untuk Pemilu, Hadar Nalla-Gunay mengemukakan adanya dugaan instruksi pejabat KPU itu. Hadar ingin semua kasus yang menimpa KPU segera diproses secara hukum. "Agar tak hanya dugaan, ini harus diproses dan dituntaskan apa pun namanya," ujar Hadar, kemarin.

Umum tidak menyedekahkan verbal ulang di Nusa Tenggara Timur (NTT). "Sebelumnya, Partai Umat tidak bisa verifikasi faktual karena dari 17 kabupaten yang ada Partai Umat nya, hanya 12 kabupaten yang memenuhi syarat," kata Ketua KPU NTT Thomas Dohu kepada Media Indonesia di Kupang, kemarin.

Keterbukaan itu akan membuat proses tahapan pemilu lancar.

Hadar menyampaikan sikap KPU yang tidak merespon cepat terkait dengan adanya rekaman tersebut. "Jadi, mereka tidak merespon seperti yang diharapkan atau sebaliknya. Mereka lakukan sudah terbuka itu menurut saya belum terbuka," ujarnya.

Terbuka

Anggota Komisi II DPR Riffyatul Karuniyah saat dihubungi mengatakan sikap Komisi II DPR tetap sama meminta agar seluruh proses yang dinyatakan kecurangan bisa dibuka KPU. "Kalau memang kecurangan itu ada bukti-buktinya yang sudah disampaikan, misalnya, Perdam, KIR, dan LSM lainnya, kami meminta agar bukti-bukti itu disampaikan proses hukum penegakan pemilu dalam hal ini melalui Bawaslu," ucapnya, kemarin.

PERKUMPULAN WAHANA MUSIK INDONESIA LAPORAN POSISI KEUANGAN (AUDITED) Per 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah)		
URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setoran Kas	168.249.998,000	128.424.746,000
Piutang Dagang	131.477,296	3.019.662,000
Sisa Dibayar Dimuka	153.620,833	162.246,710
Jumlah Aset Lancar	353.348.127,129	293.690.654,710
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap		
Tanah dan Bangunan	604,214,911	-
Aset Tidak Berwujud		
Tanah dan Bangunan	891.780,299	719.753,749
Aset Lain-lain	61.962,819	141.944,710
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.497.957,929	861.708,459
Jumlah Aset	354.846.085,129	294.399,113,710
LIANGGARAN & LIANGGARAN		
LIANGGARAN		
LIANGGARAN BERTANGGUNG JAWAB		
Utang Dagang	139.011.743,302	117.363.433,000
Utang Lain-lain	-	14.280,000
Utang Pajak	7.190.648,429	6.077.762,748
Sisa Yang Masih Harus Dibayar	3.401.501,500	1.241.643,250
Jumlah LIANGGARAN BERTANGGUNG JAWAB	157.603.893,231	134.697,088,998
Aset Bersih		
Aset Bersih Tidak Berwujud	220.000,000	200.000,000
Aset Bersih Tidak Berwujud	-	87.713,270
Jumlah Aset Bersih	220.000,000	287.713,270
Jumlah LIANGGARAN dan Aset Bersih	157.603,893,231	134.697,088,998

PERKUMPULAN WAHANA MUSIK INDONESIA LAPORAN AKTIVITAS (AUDITED) Untuk Periode Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PERUBAHAN		
Pendapatan Bersih	136.246.670,000	88.493.231,000
Pendapatan Lain-lain	2.890.136,100	5.090.513,260
Jumlah Pendapatan	139.136.806,100	93.583.744,260
Beban Operasional	126.450.404,348	80.200.074,000
Beban Lain-lain dan Administrasi	14.208.094,268	3.979.403,360
Beban Lain-lain	1.270.000,000	3.100.863,900
Jumlah Beban	141.928.500,616	87.180,341,260
PERUBAHAN ASET BERSIH PERIODE	17.208.305,484	6.403,403,000
Beban Pajak Penghasilan	89.291,000	132.711,000
PERUBAHAN ASET BERSIH	17.119,004,484	6.270,692,000
ASET BERSIH AWAL TAHUN	143.424,710	137.154,110
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	160.543,714	143.424,710

PERKUMPULAN WAHANA MUSIK INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH (AUDITED) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Bersih Tidak Berwujud		
Jumlah Aset Bersih Tidak Berwujud	181.000,000	143.424,710
Aset Bersih Tidak Berwujud Akhir Tahun	181.000,000	143.424,710
Aset Bersih Tidak Berwujud Awal Tahun	143.424,710	143.424,710
Aset Bersih Tidak Berwujud Akhir Tahun	181.000,000	143.424,710
Aset Bersih Tidak Berwujud		
Jumlah Aset Bersih Tidak Berwujud	220.000,000	200.000,000
Aset Bersih Tidak Berwujud		
Jumlah Aset Bersih Tidak Berwujud	87.713,270	87.713,270
Aset Bersih Tidak Berwujud		
Jumlah Aset Bersih Tidak Berwujud	220.000,000	200.000,000
Aset Bersih Tidak Berwujud		
Jumlah Aset Bersih Tidak Berwujud	220.000,000	200.000,000
Jumlah Aset Bersih	220.000,000	287.713,270

KOMITMEN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TENTANG LARANGAN PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENERIMAAN GRATIFIKASI KEPADA SELURUH JAJARAN PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAANNYA.

Dalam rangka pengendalian gratifikasi terkait momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya, serta sesuai komitmen PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta Anak Perusahaan sebagai entitas yang memegang teguh prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta dalam rangka menepatkan budaya Perusahaan yang berintegritas dan bersih dan praktik-praktik korupsi, dengan ini dibentangkan bahwa PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta Anak Perusahaan menetapkan **LARANGAN** bagi seluruh Insan Perusahaan, baik Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat, maupun Karyawan, untuk:

1. Meminta, memberikan dan/atau menerima gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang bertubuhan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya;
2. Melakukan perbuatan atau tindakan korupsi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Meminta dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan Perusahaan kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
4. Menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

Apabila ada pihak-pihak yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap komitmen tersebut, mohon kepercayaannya untuk melaporkan melalui Whistleblowing System (WBS) Pupuk Indonesia pada tautan: <https://pbclean.pupuk-indonesia.com> atau melalui surat elektronik (e-mail) ke: pbclean@pupuk-indonesia.com.

Kami sangat berterima kasih dan menghargai dukungan segenap pemangku kepentingan dalam membantu kami mewujudkan komitmen PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta Anak Perusahaan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Jakarta, 21 Desember 2022
PT Pupuk Indonesia (Persero)

Di:
Bakir Pasaman
Direktur Utama

Beserta seluruh Anak Perusahaan